



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

STRATEGI PENGELOLAAN UTANG UNTUK PEMBIAYAAN APBN

Universitas Lampung
Bandar Lampung
13 April 2017



Bersama
Membangun
Indonesia



Mengapa Berutang? (1)

Individu

Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menjalankan Usaha

Kebutuhan Mendesak

Negara

Sarana memberikan alternatif investasi bagi masyarakat

Menyediakan benchmark bagi instrumen keuangan

Membantu Bank Indonesia bagi kegiatan Operasi Moneter

Defisit APBN



Mengapa Berutang? (2)

APBN 2017 (dalam miliar rupiah)

Pendapatan	1,750,283
- Pajak	1,307,639
- Bea Cukai	191,233
- PNB	250,039
- Hibah	1,373

Belanja	2,080,451
- Belanja Pemerintah Pusat	1,315,526
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa	764,925

Defisit	(330,168)
----------------	------------------

Pembiayaan	330,168
- Pembiayaan Utang	384,690
- Pembiayaan Non Utang	(54,523)

2013

- Pembiayaan Rp237 T
- Pembiayaan Utang Rp219 T
- Non Utang Rp18T

2014

- Pembiayaan Rp249 T
- Pembiayaan Utang Rp253 T
- Non Utang -Rp4T

2015

- Pembiayaan Rp323 T
- Pembiayaan Utang Rp378 T
- Non Utang -Rp55T

2016

- Pembiayaan Rp330 T
- Pembiayaan Utang Rp398 T
- Non Utang -Rp68T

2017

- Pembiayaan Rp330 T
- Pembiayaan Utang Rp384 T
- Non Utang -Rp54T



Filosofi Utang



Pemanfaatan utang yang produktif akan meringankan generasi mendatang

Potensi

Sumber: efisien dan risikonya rendah
(*cost of borrowing*-nya rendah)

Pemanfaatan: kegiatan produktif



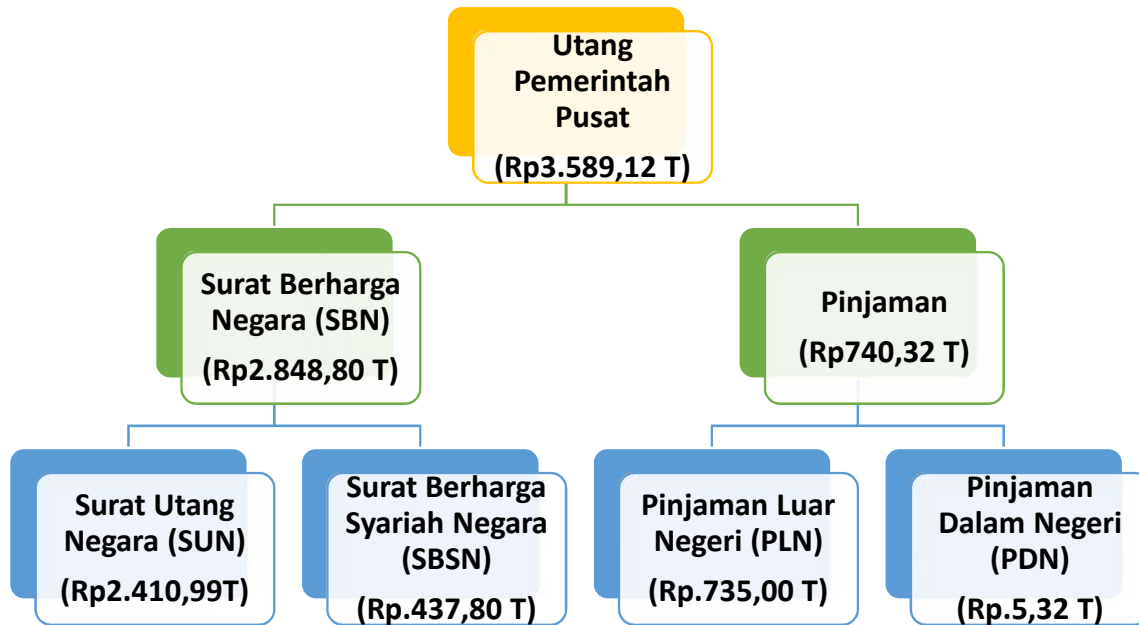
Risiko

Sumber: kurang efisien dan risikonya tinggi
(*cost of borrowing*-nya tinggi)

Pemanfaatan: kurang produktif

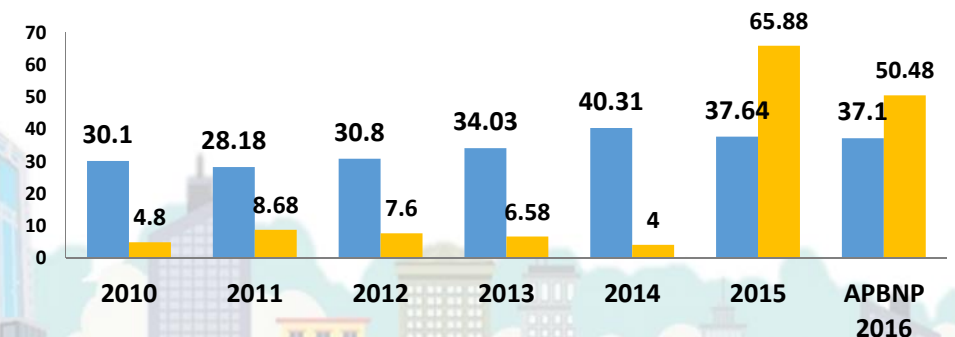
1. Utang untuk Investasi (*Golden rule*);
2. Utang untuk investasi mendorong produktifitas lebih tinggi dari risikonya;
3. Utang untuk investasi dapat memenuhi keadilan antar generasi karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang

Instrumen Utang dan Penggunaannya



Pembiayaan Anggaran (triliun Rupiah)	2015	2016	
	LKPP Audited	APBNP	Realisasi Sementara
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	307,9	299,3	344,9
1. Perbankan Dalam Negeri	4,9	25,4	25,9
2. Non-Perbankan dalam negeri	303,0	273,9	319,0
a.l Penyertaan Modal Negara	(70,4)	(65,2)	(65,2)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	15,3	(2,5)	(14,6)
PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II)	323,1	296,7	330,3

■ Dividen ■ PMN BUMN



- *Outstanding* utang Pemerintah Pusat per akhir Februari 2017 adalah sebesar Rp.3.589,12T.
- Instrumen Utang Pemerintah Pusat terdiri dari SBN dan Pinjaman.
- Agar peningkatan kebutuhan pembiayaan dapat terjaga dan berkesinambungan, maka pembiayaan utang diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif.
- Contoh penggunaan yang lebih produktif adalah pembiayaan infrastruktur dan penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.



Kebijakan Umum Pengelolaan Utang



1

*Prioritas Utang
Dalam Negeri*

2

*Diversifikasi
Instrumen*

3

*Fleksibilitas
Pembiayaan*

4

*Pinjaman untuk belanja
modal, terutama
infrastruktur*

5

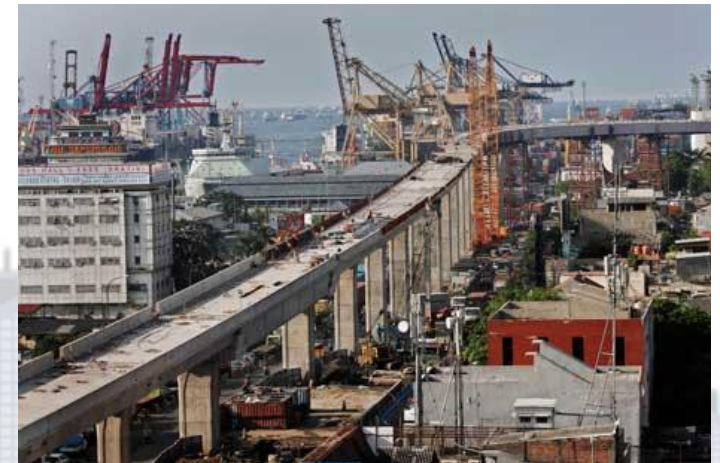
*Pengelolaan utang
secara aktif dalam
kerangka ALM*

6

*Penjaminan Pemerintah
untuk mendorong
percepatan infrastruktur*

7

*Transparansi &
Akuntabilitas*



Siklus Pengelolaan Utang

- Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan
- Input untuk Strategi berikutnya (jangka menengah dan tahunan)



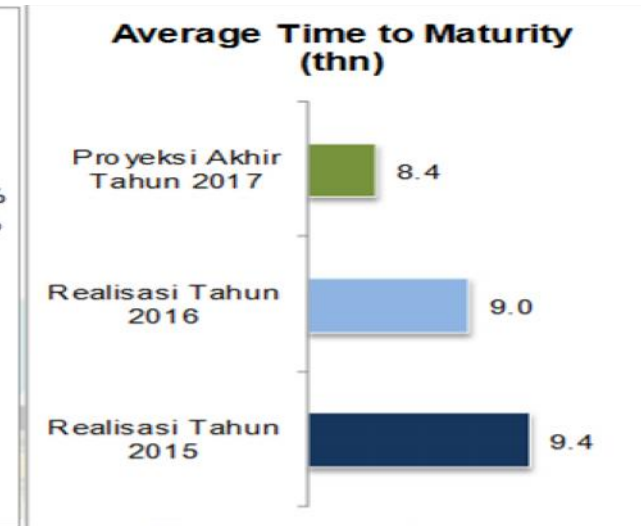
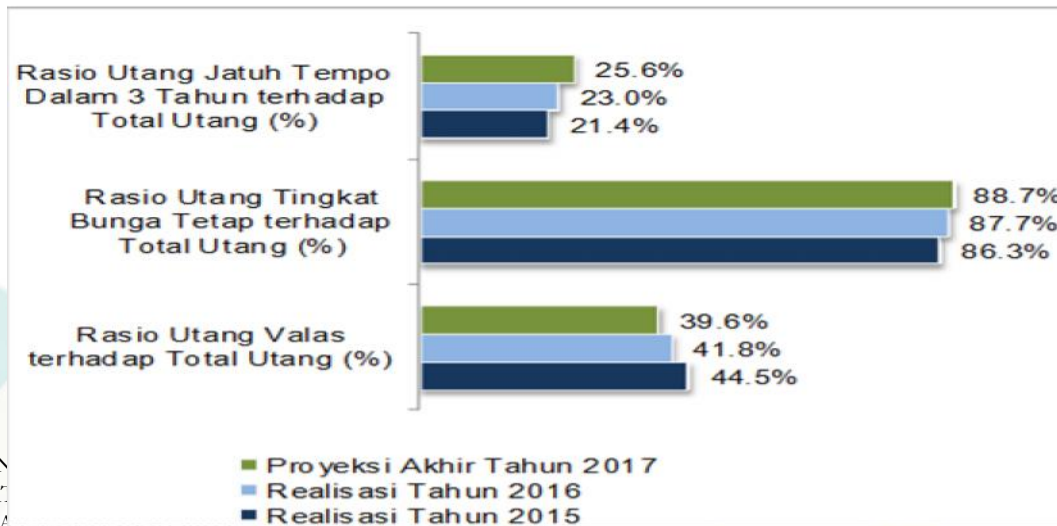
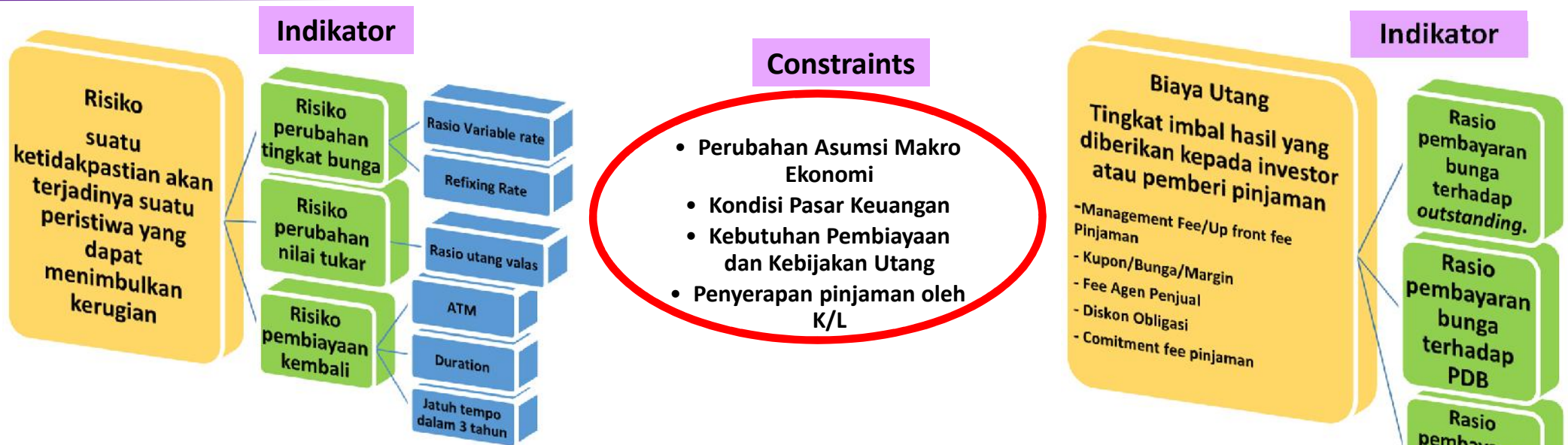
- Kebijakan umum pengelolaan utang
- Target portofolio jangka menengah
- Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali setiap tahun

- Target portofolio tahunan (komponen, struktur instrumen, dll)
 - Pedoman mengukur KPI
- Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di tengah tahun dengan melihat perkembangan kondisi pasar

- Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)
- Pedoman untuk eksekusi pengelolaan utang untuk tahun ybs.
- Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisi selama siklus APBN.



Apakah Risiko dan Biaya Utang?



Pengadaan Utang dan Tantangannya di tahun 2017

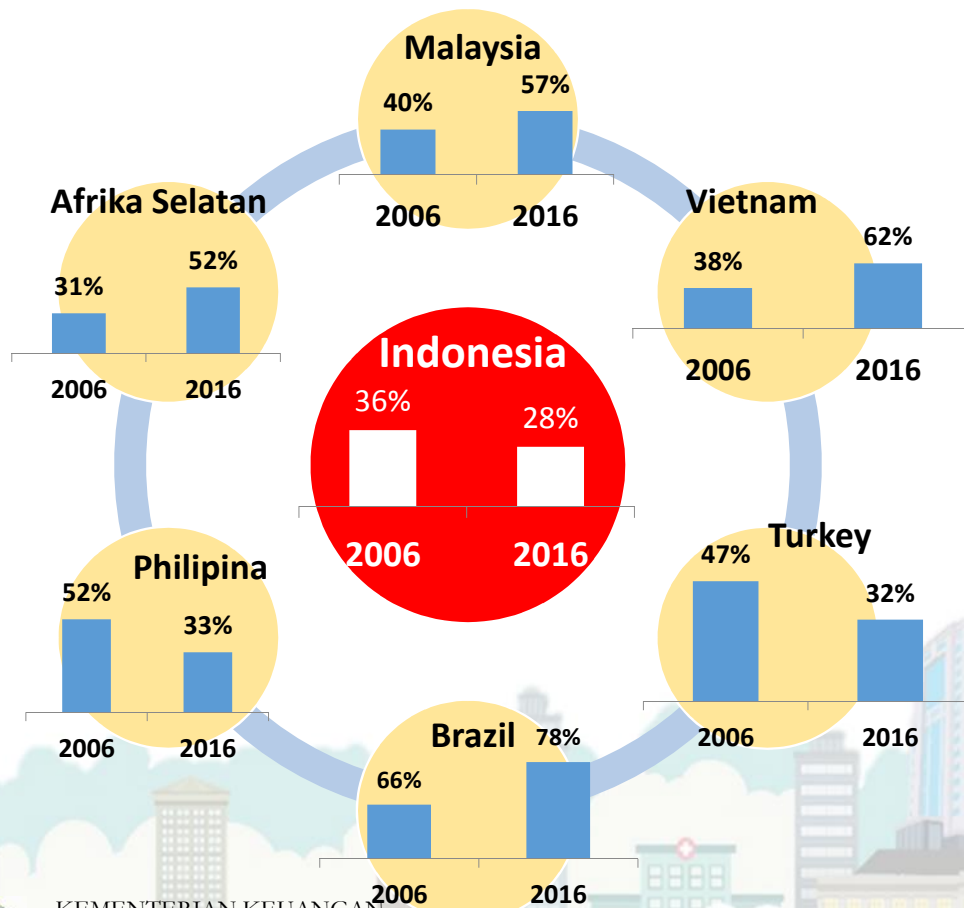


Ket: *) Tidak termasuk penerbitan SPN/S 3 dan 6 bulan untuk *cash management* sebesar Rp119 triliun yang jatuh tempo pada tahun yang sama dan akan *di-refinance* dengan penerbitan SPN/S dengan tenor yang sama.



Contoh Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang di Indonesia

Perbandingan Rasio Utang Terhadap PDB dari Beberapa Negara Peers dan BRICS



Perkembangan Rating Indonesia 1999 – 2017

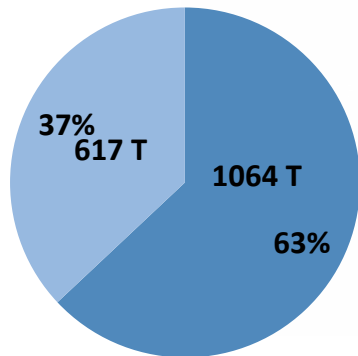
Tahun	Rating					
	S&P	Fitch	Moody's	R&I	JCRA	CRC
1999	CCC+	B-	B3	B-	-	6
2000	B-	B-	B3	B-	-	6
2001	CCC	B-	B3	B-	-	6
2002	CCC+	B	B3	B-	B	6
2003	B	B+	B2	B-	B	6
2004	B+	B+	B2	B	B+	6
2005	B+	BB-	B2	BB-	B+	5
2006	BB-	BB-	B1	BB-	BB-	5
2007	BB-	BB-	Ba3	BB+	BB	5
2008	BB-	BB	Ba3	BB+	BB	5
2009	BB-	BB	Ba2	BB+	BB+	5
2010	BB	BB+	Ba2	BB+	BBB-	4
2011	BB+	BBB-	Ba1	BB+	BBB-	4
2012	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3
2013	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3
2014	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3
2015	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3
2016	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3
2017	BB+	BBB-	Baa3	BBB-	BBB-	3

Lembaga rating Fitch, Moody's, dan JCRA telah meningkatkan *Outlook Sovereign Credit Rating* Indonesia dari *stable* ke *positive* pada akhir 2016 dan awal 2017.

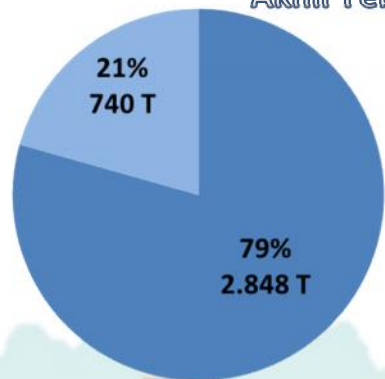
Outstanding Utang Meningkat, Risiko Utang Yang Semakin Terkendali

Outstanding Utang

Akhir Des 2011



Akhir Feb 2017

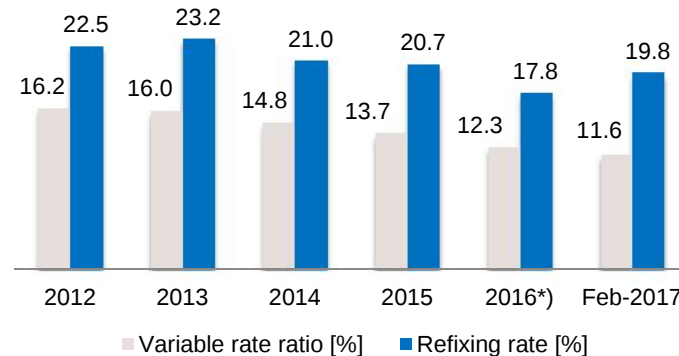


■ SBN ■ Pinjaman

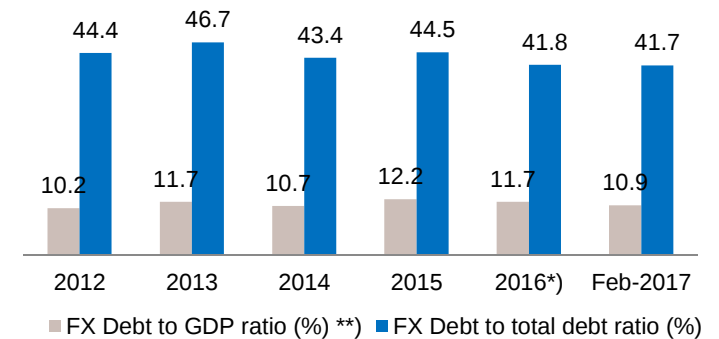
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Risiko Utang

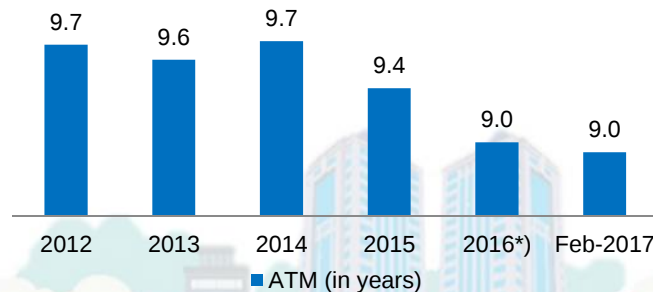
Interest Rate Risk



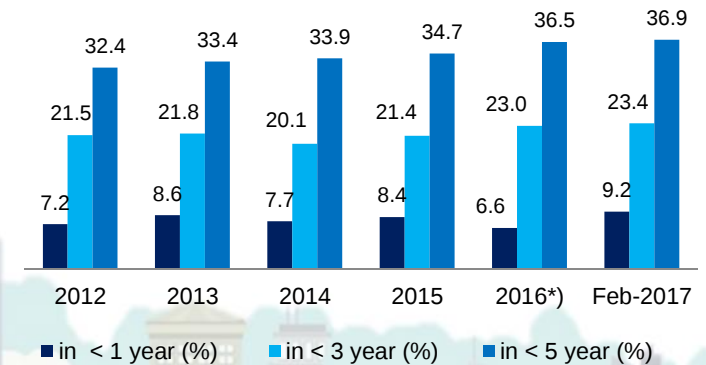
Exchange Rate Risk



Average Time To Maturity



Debt Maturing



Ket: *) Realisasi sementara, **) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017



Akhir Presentasi

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melalui

<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>

Email : iru.djppr@kemenkeu.go.id



@DJPPRkemenkeu



DJPPRKemenkeu



DJPPRKemenkeu



@djpprkemenkeu



Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616